

PENDIDIKAN POLITIK DAN POLITIK PENDIDIKAN

Sunarso

Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan Perbandingan Sistem Pemerintahan
pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FISE UNY

Abstract

Political education, therefore, as such, has not had a central part in curriculum, although what is often referred to as the hidden curriculum could be argued to have contributed to a political education of sorts, shaping the attitudes of students towards authority and implicitly forming the values of the students in such politically important matters as social justice, racial and gender equality, or national loyalty. But such political formation would be implicit, and indeed the protesters in the 1970s against the exploration in classrooms of the rights and wrongs of nuclear warfare did not see that their own action enforced a particular political position as the legitimate one to be subscribed to by teachers.

Education and politics are inextricably linked. Politics is inseparable from education, unless the country plans to generate illiterate politicians' who could not be expected to lead the republic out of the current crises. You cannot escape politics or separate it from education. Politics is the way to manage the broad environment, and not merely a struggle for power. Therefore it is the duty of schools to help students differentiate between good politics and bad politics.

Keywords: *Political education, Political socialization, State hegemony.*

Pendahuluan

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Ilmu politik membahas secara sistematis dan analitis masalah kenegaraan, dan merupakan ilmu sosial yang paling tua di dunia. Tempat asalnya diduga negara Yunani, pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ilmu politik adalah disiplin ilmu yang beroperasi dengan konsep dan ide filosofis tersendiri, yang dipraktekkan dengan metode pertanyaan dan analisis tentang pengorganisasian suatu negara, dengan tujuan agar rakyat bisa hidup makmur dan bahagia. Ilmu tersebut diharapkan bisa memberikan tata hidup yang baik. Maka pikiran-pikiran politik Yunani di masa Plato merupakan

campuran dari legenda, mite, teologi, alegori, dan religi. Plato menamakan pribadi manusia sebagai *homo politicus*, yaitu manusia politik secara abstrak, yang suka berpolitik, untuk menata masyarakat dan negaranya, tanpa memandang asal dan derajatnya, di satu negara.

Politik di abad pertengahan lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah spiritual, moral, dan etis. Maka politik dan etika di zaman itu tidak bisa dipisahkan satu dari lainnya. Sedang paham politik modern yang dipelopori oleh Machiavelli, menyatakan bahwa yang penting bukannya bagaimana seharusnya bentuk satu negara, akan tetapi bagaimana caranya kita bertindak dalam dunia politik dan diplomasi. Bagi Machiavelli tercapainya tujuan adalah segalanya. Segala cara bisa ditempuh untuk tercapainya suatu tujuan. Pendidikan merupakan proses sosial dan proses sosialisasi manusia. Proses sosial menjadi dimensi utama dari filsafat pendidikan. Adanya relasi sosial yang berbeda dalam wadah suatu negara, yang bergantung pada renggang dan dekatnya relasi sosial antara individu dengan individu lain, akan menyebabkan munculnya praktek pendidikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh di negara demokrasi orang menghargai perbedaan yang unik pada setiap individu. Oleh karena itu orang menyusun sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi pribadi-pribadi yang unik tadi.

Di negara totaliter orang membatasi kebebasan individu, dengan jalan memberikan pendidikan dengan pola *uniform*, ketat dan keras. Sistem pendidikannya hanya ada satu, berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru sikapnya otoriter dan mutlak, serta mengajar dengan tangan besi. Guru dengan ketat meneruskan semua perintah dari kekuasaan politik yang juga otoriter sifatnya. Bagi negara totaliter, pendidikan adalah merupakan kekuatan politik. Karena itu pendidikan harus ada ditangan negara, dan negara secara mutlak mengatur pendidikan. Tujuan pendidikan di negara totaliter adalah membuat manusia menjadi alat negara.

Salah satu fenomena amat menakjubkan, bukan hanya dalam filsafat politik, tetapi juga dalam kesadaran nyata masyarakat adalah pengakuan hampir universal terhadap demokrasi. Meskipun seratus tahun yang lalu kebanyakan orang di bumi ini belum pernah mendengar apapun tentang demokrasi, sekarang keabsahan etis dan politis sebuah negara hampir di seluruh dunia diukur pada kadar kedemokrasiannya. Dalam negara demokrasi, juga tercakup hak-hak lain seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak memilih anggota perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia, hak kebebasan beragama, hak berorganisasi. Di negara demokrasi ada kebebasan yang sama bagi setiap warganegara, serta adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan martabat individu selaku pribadi. Pengakuan

selaku pribadi itu mencakup pengertian bahwa manusia itu: (1) berhak memenuhi segala kebutuhannya yang kodrati; (2) berhak untuk meningkatkan derajat dan martabat dirinya; (3) berhak mendapatkan pengakuan terhadap milik pribadi. Oleh karena itu pendidikan harus diupayakan untuk, mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dengan bebas dan maksimal. Sanggup melakukan realisasi diri, supaya bisa hidup sejahtera. Tugas esensial negara demokrasi ialah mengembangkan potensi-potensi rakyatnya dalam iklim damai dan adil. Generasi muda harus mentransfer banyak warisan kebudayaan, misalnya bahasa, adat kebiasaan, tingkah laku, norma, nilai, keyakinan beragama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lain. Semua itu dilakukan lewat media pendidikan dalam iklim yang bebas.

Lewat pendidikan anak didik memecahkan permasalahan hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di hari-hari mendatang. Oleh karena itu tingginya tingkat pendidikan dan taraf kebudayaan rakyat akan sangat besar artinya, bahkan vital bagi pertumbuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara sangat berkepentingan dengan pendidikan warga negaranya, sehingga pendidikan harus diutamakan dan direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Di negara demokrasi, pendidikan tidak dilakukan lewat *drilling*, *dresur indoktrinasi*, tekanan, dan paksaan dari atas atau dari luar. Untuk melakukan pendidikan dengan bebas, dalam rangka mengembangkan kebebasan manusia, perlu adanya masyarakat bebas, dan kebebasan dalam dunia pendidikan. Menurut Plato dan Rousseau, dinamika kodrati yang ada pada diri setiap manusia ialah: (1) ambisi yang dinamis untuk memperbaiki nasib sendiri; (2) hasrat untuk mengangkat diri ke taraf yang lebih tinggi; (3) semangat untuk terus berjuang dan mendapatkan kemajuan dalam hidupnya. Alam demokrasi mengakui nilai individu dan martabat pribadi. Sedang negara demokrasi lewat sistem pendidikannya bertujuan membentuk warga negara menjadi pribadi dengan identitas unik. Setiap individu harus mendapatkan pendidikan yang layak sebagai manusia, disesuaikan dengan bakatnya. Tidak dapat berkembangnya bakat dan potensi manusia, jelas merupakan kesalahan politis dan teknis yang harus dikoreksi. Kesalahan serta kegagalan ini tidak saja merugikan individu yang bersangkutan, akan tetapi pasti juga memiskinkan masyarakat dan negara.

Pendidikan adalah faktor politik dan kekuatan politik. Pendidikan dan sekolah adalah merupakan pencerminan kekuatan-kekuatan sosial politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Karena itu tujuan pendidikan erat sekali berkaitan dengan filsafat negara dan tujuan politik negara.

Pendidikan juga merupakan penjabaran dari filsafat negara dan tujuan politik negara. Pendidikan itu tidak pernah netral. Artinya pendidikan bisa dipakai sebagai instrumen untuk mencapai kebebasan, atau justru digunakan sebagai alat untuk memperbudak, menindas dan membelenggu sesama manusia oleh pihak-pihak yang berkuasa. Pendidikan sering menjadikan anak didik sebagai objek, untuk tujuan politik dan komersial tertentu. Dalam kondisi ini pendidikan berubah wujud menjadi “*anti pendidikan*” disertai usaha “*dehumanisasi*”.

Pendidikan Politik

Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan, sebaliknya pendidikan adalah institusi yang penting peranannya dalam hal pengembangan bidang politik. Coleman menyebutkan peranan sistem persekolahan dalam bidang politik, yaitu (1) sosialisasi politik, yaitu sistem persekolahan merupakan institusi untuk sosialisasi peserta didik terhadap budaya politik nasional; (2) seleksi dan latihan bagi kaum elit dalam bidang politik; (3) integrasi dan pembangunan kesadaran politik nasional. Sosialisasi politik merupakan proses yang memberikan kemungkinan bagi seorang untuk mengalami internalisasi norma dan nilai suatu sistem politik. Sosialisasi politik sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lain seperti keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan media massa, namun sekolah merupakan sekolah salah satu agen sosialisasi politik yang terpenting. Melalui sekolah seleksi dilakukan kepada calon elit politik melalui interaksi dan latihan berdemokrasi dan kepemimpinan.

Di banyak negara berkembang pendidikan politik dan pendidikan demokrasi sering dianggap sebagai “*taken for granted or ignored*”, yakni dianggap akan terjadi dengan sendirinya (gandal dan Finn dalam Winataputra, 2005:2). Pendidikan demokrasi sebaiknya ditempatkan sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan lewat dua jalur, yakni lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam masyarakat. Pendidikan politik berperan sebagai *maintenance atau persistence*, untuk memelihara sebuah sistem politik (Almond, dalam Cholisin, 2000: 6.3). Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai *nation and character building* bagi bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan juga berfungsi sebagai “*representative government under the rule of law*” mewujudkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan hukum. Adapun ciri pemerintahan demokratis adalah: adanya konstitusi, pengadilan yang independen, pemilu yang bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan diselenggarakannya civic education.

Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warga negara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang penting bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis berdasar hukum. Konsep budaya demokrasi sebagai kombinasi yang seimbang antara karakteristik : rasional, aktif, memiliki informasi yang cukup tentang politik, loyal pada sistem politik, percaya dan patuh pada pemerintah, ada kepercayaan antar sesama warganegara (Almond dan Verba, 1984:436). Ciri budaya demokrasi adalah dihargainya nilai-nilai egalitarian, pluralisme, keterbukaan, dialogis, persuasif, distribusi kekuasaan, oposisi dsb.

Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sistem pemerintahan secara sehat. Negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi memerlukan sarana pendidikan yang memungkinkan generasi mudanya untuk mengetahui tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi. Pendidikan politik (*political education*) bertujuan menyiapkan generasi muda untuk berpikir merdeka seputar esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya, seputar faktor-faktor yang berpengaruh dalam lembaga-lembaga atau berpengaruh dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga. Esensi dari pendidikan politik adalah mengaitkan aktivitas pendidikan dengan praktek kekuasaan secara seimbang, berguna, dan demokratis (Edgar Fore dalam Utsman, 2000: 81).

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan, melalui pesan ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti pemerintah, sekolah, dan partai politik (Ramlan Surbakti, 1992:117). Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun (Alfian, 1990: 245). Sosialisasi politik adalah merupakan pendidikan politik dalam arti yang longgar.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkatkan partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan (Almond dan Verba, 1984: 447). Jadi pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terencana, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus menerus dari generasi

ke generasi, agar warga negara mau berpartisipasi dalam politik, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab.

Sosialisai Politik

Sosialisasi politik dalam arti luas adalah merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Kennet P Langton dalam Cholisin, 2000: 6). Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi, yang bertujuan khusus untuk membentuk nilai-nilai politik, yakni tentang bagaimana seharusnya setiap anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politik (Almond dan Verba, 1984: 447). Sosialisasi politik adalah suatu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat terbentuk sikap dan orientasi politiknya (Ramlan Surbakti, 1992:117). Sosialisasi politik merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai politik dari masyarakat kepada individu. Proses ini bisa berlangsung terus menerus sejak masa kanak-kanak sampai usia lanjut, selama hidup baik disadari maupun tidak. Proses pewarisan nilai-nilai politik dari generasi ke generasi berikutnya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses politik yang sedang berlangsung di negaranya, sehingga diharapkan setiap anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam sistem politik (Nazarudin, 1993: 88).

Ada lima teori mengenai sosialisasi politik: (1) Teori Sistem; (2) Teori hegemonik; (3) Teori Psikodinamik; (4) Teori belajar sosial dan; (5) Teori perkembangan kognitif (Prewitt & Dawson, dalam Cholisin 2000: 6.3-6.5).

Teori Sistem. Menurut Teori Sistem, sosialisasi politik dianggap memainkan peranan utama dalam menjaga kestabilan politik, sehingga memungkinkan sistem politik yang sama berlaku terus menerus sehingga mencapai dan berada dalam suasana mapan. Sosialisasi politik menurut teori ini diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sistem politik yang ideal, yang ingin dibangun. Bagi bangsa Indonesia sistem politik demokrasi yang ideal adalah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Teori Hegemonik. Menurut Teori hegemonik sosialisasi politik diarahkan oleh kelompok kekuatan politik yang dominan. Dalam sistem ini kelompok yang berkuasa mengarahkan kelompok yang dikuasai sesuai dengan keinginan yang sedang berkuasa. Sosialisasi politik diarahkan untuk kepentingan kelompok yang sedang berkuasa, bukan untuk kepentingan sistem politik yang ideal.

Teori Psikodinamik. Menurut teori ini, pengalaman pada usia dini (kanak-kanak) meninggalkan kesan yang sangat mendalam terhadap pembentukan kepribadian seseorang anak dan setelah mereka dewasa akan merespon terhadap berbagai peristiwa ditentukan oleh kebutuhan-kebutuhan masa awal. Dari perspektif ini, kebutuhan-kebutuhan tersebut akan diadopsi anak ke dalam pandangan dunia politik, terutama yang akan memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pribadinya. Dengan demikian, kebutuhan dan pengalaman pribadi yang terbentuk pada masa awal anak-anak akan menentukan orientasi politik seseorang.

Teori Belajar Sosial. Teori ini merupakan kebalikan dari Teori Psikodinamik yang menekankan faktor internal sebagai penentu orientasi politik seseorang. Teori Belajar sosial menekankan pada faktor eksternal, yaitu penerimaan stimulus dan penguatan dari lingkungan. Pesan-pesan yang diterima individu dari lingkungan merupakan faktor yangkrusial dalam menentukan pandangan yang akan diadopsi seseorang. Pandangan yang positif diantara anak-anak terhadap kekuasaan, menurut teori ini dikarenakan pesan yang diterima anak dari keluarga, guru dan media yang memperhatikan figur penguasa.

Teori Perkembangan kognitif. Teori ini menekankan pada interaksi antara lingkungan dan perkembangan kapasitas berfikir individu. Menurut teori ini kemampuan respon dan pemahaman individu tentang sesuatu dalam lingkungannya, sangat ditentukan oleh kapasitas pemikirannya.

Bagi negara demokrasi, sosialisasi politik yang dilakukan sebaiknya yang mendukung pengembangan budaya demokrasi. Oleh karena itu sosialisasi politik yang tepat adalah mengacu pada Teori Sistem dan Teori Belajar Sosial. Sedangkan Teori Psikodinamik dan Teori Perkembangan Kognitif dapat melengkapinya.

Agen-Agen Pendidikan Politik

Sarana sosialisasi politik meliputi, keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, serta kontak-kontak politik langsung (Almond dalam Mochtar Mas'ood, 1987:37). Di dalam keluarga, anak memperoleh pemahaman nilai-nilai, sikap-sikap dan orientasi yang diperkenalkan oleh orang tuanya. Dengan demikian anak memperoleh sosialisasi yang pertama kali baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat tertanam cukup kuat dalam benak anak tersebut. Keluarga memberikan pengaruh dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang dan kekuasaan. Di dalam keluarganya anak akan memperoleh pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga, sehingga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik anak, memberikan kecakapan untuk

melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik setelah dewasa.

Di sekolah anak akan menerima sosialisasi politik secara sistematis dan terencana. dari sinilah anak memperoleh pengetahuan tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sementara itu, di dalam kelompok pergaulan, setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Kelompok pergaulan tersebut mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompoknya. Di lingkungan pekerjaan individu-individu mengidentifikasi diri dengan kelompoknya.

Proses sosialisasi politik terdapat dua tipe, yaitu tipe sosialisasi politik tak langsung dan sosialisai politik langsung (Mochtar Mas'ood, 1997: 34). Sosialisasi politik bersifat langsung apabila melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai, atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit. Mata peajaran Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah merupakan contoh dari sosialisasi politik langsung. Sedangkan sosialisasi politik tak langsung sangat kuat berlangsung di masa anak-anak sejalan dengan berkembangnya sikap penurut atau pembangkang terhadap orang tua, guru, dan teman, yaitu sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi sikap di masa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara.

Politik yang dilakukan melalui sekolah merupakan bagian dari sosialisasi politik. Ada tipe sosialisai politik langsung dan tidak langsung. Tipe sosialisasi politik langsung terdiri atas: *imitation, anticipatory socialization, political education, dan political experience*. Sedangkan tipe sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari: *interpersonal transference, apperenceship, generalization*.

1. *Imitation* adalah sosialisasi politik dengan model meniru. Model ini paling banyak dilakukan, baik oleh orang tua, muda, pandai ataupun bodoh. Yang ditiru bisa berupa tingkah laku politik, ketrampilan politik, harapan-harapan politik serta sikap politik. Modal dasar untuk dapat melakukan belajar politik dengan metode meniru adalah mobilisasi dan komunikasi. Contoh anak-anak pada umumnya memilih partai politik meniru pilihan orang tuanya.
2. *Anticipatory Socialization*, metode ini pada dasarnya dengan cara menyiapkan diri tentang peran politik yang diinginkan. Misalnya orang tua atau guru dapat mendefinisikan peranan warga negara yang baik, sehingga anak dapat mengantisipasi peran yang dituntut oleh sistem politik nasionalnya.
3. *Political Education*, metode ini dilakukan dengan dialogis, terbuka, rasional. Contohnya di sekolah lewat Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuannya untuk

mewujudkan “good citizen”. Dilakukan dengan pendekatan ilmiah bukan dengan cara indoktrimasi.

4. *Political Experiance*. Metode ini menekankan adanya kontak politik langsung, dengan pejabat yang membuat keputusan.
5. *Interpersona Transference*. Pengalaman hubungan pribadi dengan orang tua dalam keluarga, ataupun dengan guru di sekolah, akan menjadi pengalaman anak kelah berhubungan dengan figur penguasa.
6. *Apperenticeship* (magang). Aktivitas-aktivitas non-politik akan dipandang sebagai praktek magang untuk aktivitas politik. Misalnya aktivitas dalam kepramukaan, aktivitas di oraganisasi sekolah, dan organisasi kenasyarakatan adalah bentuk penting dalam pembelajaran politik.
7. *Generalization*. Nilai-nilai umum yang dianut masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya politidalam suatu masyarakat. (Cholisin, 2000: 6.7).

Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memegang peranan penting. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sosialisasi politik lewat sekolah dipengaruhi agen-agen yang lain. Namun sosialisasi politik lewat sekolah sering dinyatakan lebih bermakna dibandingkan melalui agen=agen yang lain. Krena sekolah memiliki karakteristik antara lain: terpogram, dan sistematis karena menggunakan kurikulum. Sekolah memiliki karakteristik tempat berinteraksinya orientasi politik yang telah diperoleh dalam sosialisasi politik lewat agen yang lain. Sehingga dalam sosialisasi politik di sekolah, dapat bersifat mempertajam dan memperluas orientasi politik yang telah dimiliki peserta didik.

Politik Pendidikan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikan. *Pertama*, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. *Kedua*, politik pendidikan lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. *Ketiga*, politik pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi msyarakat, dan sebagainya. *Keempat*, politik pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencapaian pendidikan sebagai pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa yang berkarakter (Supriyoko dalam Ali Mahmudi Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta Pustaka Fahima, 2007, hal 5).

Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsepsi rakyat mengenai bentuk

negara dalam sistem pendidikan (Kartini Kartono *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1977. hlm 28). Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistem pendidikan terjadi *mutually reinforcing*. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depan (George F. Kneller, *Foundation of Education*, New York: John Wiley and Sons, hlm. 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjalanan pendidikan kebangsaan. Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, maka konsep pendidikan yang akan dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan. Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, maupun sosial. Bagi pemerintah, selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pendidikan akan membuat kebijakan pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

Hubungan Politik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses pendidikan di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic*. Menurut Plato, "Para filsuf memiliki otoritas tertinggi, para pengawas berpendidikan menengah bertindak sebagai kekuatan militer dan polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan ekonomi negara menempati status terendah di antara semuanya. Pendidikan harus disesuaikan secara cermat dengan reproduksi sistem. Kelas yang lebih rendah dididik untuk patuh dan diyakinkan dengan mitos-mitos politik bahwa status mereka itu terbentuk oleh sebab-sebab alamiah (M Sirozi, 2001: 1). Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas

hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Berikut ini adalah kesan mendalam Allan Bloom (Allan Bloom 1987, *Closing of the American Mind*. New York: Simon and Schuster, hal. 380). Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yang secara terus menerus menguasai kekuasaan politik, ekonom, agama, dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (Allan Bloom 1987, *Closing of the American Mind*. New York: Simon and Schuster, hal. 380). mengatakan "*education and politics are inextricably linked*" (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dilepaskan). Hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendekia. Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antarberbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dan kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara pascakolonial, kelompok masyarakat yang mendapat *privelese* pendidikan lebih mampu melakukan konsolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. *Privelese* atau diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama.

Besarnya peran sistem persekolahan dalam meruntuhkan kolonialisme terlihat jelas dalam pengalaman bangsa Indonesia. Pada satu sisi, kebijakan politik pemerintah kolonial, politik etis, misalnya, telah memperluas akses pendidikan bagi kaum pribumi, khususnya para aktivis nasionalis. Pada sisi lain, bekal pendidikan yang diperoleh telah memperluas wawasan sosial politik mereka dan pada saat yang sama memperkuat sentimen kebangsaan mereka. Wawasan dan sentimen kebangsaan itulah yang kemudian memacu aktivitas politik mereka dan menumbuhkan semangat perlawanan mereka terhadap pemerintah kolonial pada waktu itu.

Pemerintah kolonial pada waktu itu tentu saja berharap bahwa bekal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan loyalitas tokoh-tokoh pribumi. Namun, kenyataan berkata lain, tokoh-tokoh tersebut justru berkembang menjadi figur utama dalam gerakan nasionalis yang menggugat kolonialisme. Inilah yang terjadi pada sosok Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya. Terlepas dari berbagai implikasi sosial politik yang menyertainya, pengalaman pendidikan dan kiprah politik tokoh-tokoh nasionalis tersebut mempertegas eratnya hubungan antara pendidikan dan politik.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud kedalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial politik di mana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dalam suatu masyarakat hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pada hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif, yang berdasarkan pada basis kesukuan misalnya, adalah lazim bagi orang tua dari satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpin politik dan sebagai pendidik. Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keputusan itu diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajarkan mereka teknik-teknik berburu, dan mencari ikan, metode berperang dan sebagainya. Mereka juga menanamkan pada generasi muda mereka kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi, dan mempersiapkan mereka untuk berperan secara politik.

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari tradisional ke pola modern. Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan pola hubungan politik dan pendidikan di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara-negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara-negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian atau bukan merupakan topik yang hangat dalam wacana publik.

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki aspek dan wajah politik yang banyak, serta memiliki beberapa fungsi penting yang berdampak pada sistem politik, stabilitas dan praktik sehari-harinya. Dalam masyarakat modern pendidikan merupakan wilayah tanggung jawab pemerintah. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah. Karena besarnya nuansa politik dari kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai faktor politis yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan turut mempengaruhi bagaimana kontrol terhadap pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan dibuat. Sebagai wilayah tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering dipaksa menyesuaikan diri dengan pola-pola administrasi umum dan norma-norma yang berlaku. Akibatnya pendidikan publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah. Seperti pemerintah membiayai dan mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertanian, kesehatan, atau pelayanan sosial.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan nonpemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah nonpemerintah sangat tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah nonpemerintah tersebut sering kali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam sekolah, melaksanakan upacara tertentu dan sebagainya.

Sekolah-sekolah nonpemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa lari dari visi, misi, dan tujuan awal pendiriannya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang, sangat sedikit sekolah nonpemerintah yang dapat meloloskan diri dari jerat politik pendidikan penguasa. Di Indonesia, acungan jempol pantas diberikan pada pimpinan Pondok Modern Gontor karena ketegaran mereka untuk tidak mau mengikuti berbagai persyaratan yang dituntut oleh otoritas pendidikan di negeri ini. Hasil dari ketegaran tersebut sangat jelas, sementara banyak sekolah-sekolah dan pondok pesantren nonpemerintah “kehilangan identitas” dan terjebak ke dalam uniformitas pendidikan yang diterapkan oleh otoritas pendidikan di tanah air. Selain itu, Pondok Modern Gontor adalah salah satu dari sedikit institusi pendidikan di tanah air yang mendapat pengakuan internasional. Banyak sudah lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor yang diterima di Universitas Al-Azhar Mesir, dengan kewajiban mengikuti matrikulasi yang sangat minim.

Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974. *Conceptual and Theoretical Issues*. In J.R Hough (ed) *Educational Policy: An International Survey*, London: Croom Helm. hal. 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Semua lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun nonpemerintah, dalam batas-batas tertentu tidak terlepas dari bisnis pembuatan keputusan-keputusan yang disertai otoritas dan yang dapat diberlakukan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan menurut Baldrige (1971), lembaga-lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai sistem-sistem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama sistem-sistem politik. Tentu saja aktivitas politik di sebuah sekolah dasar yang kecil dalam banyak hal kurang penting dibandingkan dengan aktivitas politik di Departemen Pendidikan. Namun, pada hakikatnya aktivitas politik di dua lembaga pendidikan tersebut sama saja jenisnya. Sebuah keputusan yang dibuat dalam rapat guru sekolah mengimplementasikan sebuah program pengajaran baru sama politisnya dengan sebuah keputusan yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dalam rangka mengalokasikan sejumlah dana bantuan untuk sekolah-sekolah tertentu. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa

mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Teori Hegemoni

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) dikemukakan selama negara dengan kekuatan represif, negara sesungguhnya juga menjalankan kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu melanggengkan kekuasaannya. Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikan. Lembaga ini dianggap sangat strategis karena memiliki fungsi utama dalam mentransformasikan segenap pengetahuan kognitif (*cognitive knowledge*), nilai-nilai (*values*), dan keterampilan (*skill*), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kognitif dan nilai-nilai inilah sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideologis oleh kelompok dominan (penguasa negara) yang selanjutnya lembaga pendidikan/persekolahan dipaksa untuk bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpinan dari suatu penguasa negara yang mendominasi. Supremasi kelompok ini mewujudkan diri dalam dua cara sebagai “dominasi” dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok oposisi untuk menundukkan mereka, bahkan dengan menggunakan alat-alat kekuatan, di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok kerabat dan sekutu mereka (Gramsci dalam Nezar dan Andi, 1999). Kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, bahkan ketika dia memegang kekuasaan. Hal ini menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: Kepemimpinan (*direction*) dan dominasi (*dominance*). *Pertama*, dominasi dijalankan atas seluruh lawan (oposisi/musuh), dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu-sekutu. *Kedua*, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk menaklukkan aparatur negara, atau dalam pengertian sempit kekuasaan pemerintahan. Dan, *ketiga*, sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek supremasi, yaitu kepemimpinan/pengarahannya dan dominasi, terus berlanjut. Gramsci (dalam Nezar dan Andi, 1999) mengakui bahwa dalam masyarakat memang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari kondisi ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jalan yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan dengan itu pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontan dari yang diperintah. Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caranya menciptakan hegemoni”.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimpangan melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Ada berbagai cara yang dipakai misalnya melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnya adalah upaya menggiring orang menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan.

Dalam konteks ini Gramsci merumuskan konsepnya yang merujuk pada pengertian tentang situasi sosial politik, dalam terminologinya “momen” di mana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi merupakan konsep dan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pengaruh dari “roh” ini membentuk moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik, dan hal-hal yang menunjukkan pada moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator (Williams, 1960).

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Bellamy, 1990). Sebagai contoh kapitalisme masih bertahan karena buruh menerima keadaan umum tersebut, dominasi budaya borjuis membuat penggunaan kekuatan politik tak perlu untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab para anggota yang dipimpin (kelompok yang terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa tanpa daya kritis.

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yang dikuasai, sesungguhnya dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Gramsci berbicara tentang konsensus, ia selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-aspek aturan yang lain. Tataran hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusi (lembaga) ataupun praktek liberal sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatu totalitarianisme dalam arti ketat. Femia (via Hendarto, 1993) menangkap tiga kategori penyesuaian yang berbeda yang dikemukakan Gramsci, yaitu karena rasa takut, karena terbiasa, dan karena persetujuan. Tipe yang terakhir inilah yang kemudian disebutnya sebagai Hegemoni. Adapun ketiga kategori itu meliputi: (1) Orang menyesuaikan diri mungkin karena takut akan konsekuensi-konsekuensi bila tidak menyesuaikan. Di sini konformitas ditempuh melalui penekanan dan sanksi-sanksi yang menakutkan; (2) Orang menyesuaikan diri mungkin karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu. Konformitas dalam hal ini merupakan soal partisipasi yang tidak terefleksi dalam hal bentuk aktivitas yang tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laku tertentu dan jarang dimungkinkan untuk menolak; (3) Konformitas yang muncul dari tingkah laku

mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.

Pendidikan dan Hegemoni Negara

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemoni oleh negara, hampir seluruh perangkat yang berkaitan dengan proses negara harus dikontrol negara. A Waidl (2000) dalam tulisannya mengungkapkan ada beberapa bentuk kontrol negara terhadap pendidikan. Bentuk hegemoni itu antara lain lewat kontrol terhadap sistem pendidikan, kurikulum, dan guru. Bahkan negara sering ikut mengawasi diskusi-diskusi dan segala bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan civitas akademika termasuk mahasiswa. Jika momen ilmiah dianggap mengganggu berlangsungnya kekuasaan, negara akan langsung turun tangan menertibkan. Walaupun kondisi saat ini sedikit demi sedikit telah terjadi perubahan sejak reformasi dan pergantian beberapa kepala pemerintahan, namun hegemoni negara yang begitu kuat dan dalam telah tertanam dalam dunia pendidikan masih susah untuk dilepas, karena menjadi bagian dari tingkah laku mereka yang ada di dalamnya. Seperti yang dikemukakan Femia (Hendarto, 1993) pada awalnya kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan karena ada penekanan dan sanksi yang menakutkan, kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi kesadaran akan suatu konsensus yang harus dijalankan. Inilah yang disebut oleh Gramsci sebagai Hegemoni Negara. "Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dalam sejarahnya selalu berhubungan dengan kekuatan negara. Meskipun keduanya mengalami perubahan dalam periode sejarah, namun keduanya selalu menjalani persinggungan, baik mengarah kepada bentuk persinggungan yang bersifat sinergis ataupun berbentuk eksploitatif. Persinggungan antar keduanya bersumber dari suatu cita-cita ideal masyarakat dan pendidikan yang hendak dibangun, itulah sebabnya pendidikan yang dilaksanakan banyak diwarnai oleh corak ideologi suatu negara".

Ketika penguasa menggunakan ideologi untuk membentuk kepatuhan masyarakat, maka ideologi tersebut telah berubah menjadi hegemoni. Hegemoni merupakan bentuk penguasaan kepada masyarakat melalui cara-cara yang tidak disadari oleh masyarakat. Kepatuhan itu dibangun melalui nilai-nilai moral yang diciptakan negara (penguasa) dan ditanamkan dengan cara-cara intelektual, sehingga masyarakat tanpa sadar mematuhi sebagai bentuk konsensus atau kontrak sosial demi kehidupan bersama. Menurut Gramsci pendidikan dan mekanisme kelembagaan seperti sekolah, partai-partai politik, media massa menjadi "tangan-

tangan” kelompok elite yang berkuasa untuk menentukan ideologi yang dominan yang menjadikan masyarakat terhegemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lama merasakan hegemoni negara tersebut, terutama pada masa Orde Baru. Banyak cara dilakukan negara mulai dari undang-undang, kurikulum yang tersentralisasi dan dibuat ahli yang dipilih negara, membina dan mendisiplinkan guru agar loyal pada negara sampai peran negara menginteli kegiatan dan aktivitas di lembaga pendidikan walaupun reformasi telah muncul ternyata sulit untuk merubahnya dengan cepat.

Pendidikan dan Kebijakan Negara

Ideologi yang dipakai suatu negara akan mempengaruhi ideologi yang dipakai oleh lembaga pendidikan, yang kemudian berkembang kepada paradigma pendidikan yang dianutnya. Pada dasarnya pendidikan berperan sangat strategis bagi pembangunan suatu bangsa. Seperti yang dikemukakan oleh John C. Bock (dalam Zamroni, 2001) bahwa peran pendidikan antara lain: (1) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; (2) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; dan (3) Untuk merasakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peran pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan yaitu paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan sikap modern. Menurut pengalaman negara-negara di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, serta menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *Human Investment*, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma fungsional, paradigma sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah (1) Mengembangkan kompetensi individu; (2) Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan

produktivitas; dan (3) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. *Pertama*, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analitis mekanis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanis melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian yang tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah, dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut, seperti nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, ijazah.

Paradigma pendidikan *input-output*, telah menjadikan lembaga pendidikan (sekolah) bagaikan proses produksi (Zamroni, 2001). Murid diperlakukan bagaikan *raw-input* dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai *instrumental input*. Jika *raw-input* dan *instrumental input* baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produk yang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat parsial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Asumsi tersebut dapat dikatakan jauh dari realitas kebenaran. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, paradigma pengambilan kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation*, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar keberhasilan melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan sistem persekolah, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu

perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan diuji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih. Sesuai dengan peran pendidikan sebagai *engine of growth*, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah *single track* dan diorganisir secara terpusat, sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan yang sesuai dengan ideologi dan kebijakan penguasa negara. [*]

Daftar Pustaka

- Abdul Rachman Assegaf. (2005). *Politik Pendidikan Nasional (Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi)*. Yogyakarta: Penerbit Kurnia Kalam.
- Ali Mahmudi Amnur. (2007). *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Alfian. (1978). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Alfian. (1990). *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Almond, Gabriel & Verba. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azra, Azyumardi. *Membangun Keadaban Demokrasi ke Arah Budaya Politik Baru Indonesia*. www.unisosdem.com/kompas-cetak/0309/26/utama/585159.htm. diakses 4 April 2007.
- Benny Susetyo. (2005). *Politik Pendidikan penguasa*. Yogyakarta: LKiS.
- Branson, Margaret S, dkk. (1999). Belajar “*Civic Education*” dari Amerika (terjemahan). Yogyakarta: LKiS dengan Dukungan The Asia Foundation (TAF).
- Cholisin, dkk. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Spsial, UNY.

- Darmaningtyas. (2004). *Pendidikan Yang Memiskinkan*. Yogyakarta: Galang Press.
- _____ (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis : Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diamond, Larry. (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation (terjemah)*. Yogyakarta: IRE Press.
- Farida Hanum. (2004). *Hegemoni Pendidikan*. Jurnal Fondasia. Fakultas Ilmu Pendidikan. UNY. Yogyakarta.
- Kartini Kartono. (1977). *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mas'oed, Mochtar. (1997). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- M. Sirozi. (2005). *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan pendidikan)*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Mu'iz R, Utsman A. (2000). *Tarbiyah Siyasiyah: Pendidikan politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan (untuk para anggota khususnya dan seluruh masyarakat Mesir umumnya tahun 1928-1954 (terjemah)*. Solo: Era Intermedia.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Nezar, Patria dan Andi Arief. (1999). *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Neil, William F. (2001). *Ideologi-ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Political Literacy Explained*. <http://www.citizenship foundation. org. uk/ page 12>. Diakses 22 Januari 2008.
- Political Literacy Within ITT Citizenship Education*. Worksshop on Political Literacy. University of Birmingham 19 November 2002. www.citized. info / pdf / converences / pilot nov workshop pdf. Diakses 22 Januari 2008.
- Sjamsuddin, Nazaruddin dalam Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin. (1991). (Penyunting). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Grafiti untuk AIPI.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. (1993). *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Winataputra, Udin S. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu*

bidangKajian Pendidikan Sosial Berbasis Pendidikan Demokrasi (Tinjauan Filosofis- Pedagogis). Makalah Seminar dan Lokakarya Nasional PKn. UNES: Semarang 1 Oktober 2005.

Winataputra, Udin S. (2007). *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi*. www.depdiknas.go.id/Jurnal/45/udin-s-winataputra.htm. Diakses 13 April 2007.

Zamroni. (2002). *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society*. Jakarta:

_____ (2001). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Bigraf Publishing.